



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG 95526
KOTAK POS 18/Bt BITUNG 95501
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAN sekretariat@bpppbitung.com

Bitung, 20 April 2026

Yth. :

1. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

di

Jakarta

SURAT PENGANTAR

Nomor : 52/BPPP.BTG/TU.140/IV/2026

No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026	1 laporan	Disampaikan dengan hormat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Natalia

Diterima oleh :

Nama :

Pada Tanggal :

Cap/Tanda tangan :



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
#GROWSTRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026



Lokasi

📍 Jalan Tandurusa, Kelurahan
Aertembaga Dua, Kecamatan
Aertembaga, Kota Bitung - Provinsi
Sulawesi Utara

Hubungi Kami

📱 bppsdm_bpppbitung
📺 bppsdm_bpppbitung
📧 sekretariat@bpppbitung.com



BerAKHLAK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Triwulan I Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan perwujudan dari pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian BPPP Bitung berdasarkan target kinerja dan penggunaan anggaran pada Tahun 2026.

Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 ini menggambarkan capaian kinerja yang telah diraih dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan untuk Tahun 2026.

Permasalahan dan kendala yang muncul pada Tahun 2026 menjadi perhatian sebagai antisipasi rencana untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya. Kami berharap dengan telah disusunnya laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini akan diperoleh manfaat dan umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja di lingkungan BPPP Bitung, sehingga masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan pada pelaporan kinerja periode selanjutnya.

Bitung, 20 April 2026
Kepala BPPP Bitung,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Natalia

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	2
1.4 Keragaan SDM BPPP Bitung	3
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	4
1.6 Potensi dan Permasalahan	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	7
2.1 Rencana Kerja Pemerintah	7
2.2 Rencana Kegiatan Tahun 2026	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2026	13
2.4 Pengukuran Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026	39
BAB IV. PENUTUP	44
4.1 Capaian Kinerja Utama	44
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Bitung	3
Tabel 2. Rencana Kegiatan Tahun 2026	13
Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2026	13
Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2026	17
Tabel 5. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	19
Tabel 6. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	19
Tabel 7. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	21
Tabel 8. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	21
Tabel 9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)	23
Tabel 10. Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	24
Tabel 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	25
Tabel 12. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	26
Tabel 13. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok).....	28
Tabel 14. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	28
Tabel 15. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok).....	30
Tabel 16. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung per bidang dan Gender	31
Tabel 17. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	32
Tabel 18. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	34
Tabel 19. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender	34

Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP	35
Tabel 21. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)	37
Tabel 22. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP.....	37
Tabel 23. Realisasi Anggaran Per 31 Maret 2026	39
Tabel 24. Efisiensi Anggaran Per 31 Maret 2026	41

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung	3
Gambar 2. Indeks capaian IKU.....	14
Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Triwulan I ahun 2026	16
Gambar 4 . Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung	44

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
Perjanjian Kinerja BPPP Bitung	49
SK Personalia BPPP Bitung Tahun 2026	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPPSDM KP sesuai dengan fungsinya melaksanakan 3 program utama, yaitu program pengembangan pendidikan KP, program pengembangan pelatihan KP dan program pengembangan penyuluhan KP. Dari 3 program utama tersebut BPPP Bitung sebagai salah satu UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala BPPSDM KP sesuai tugas dan fungsinya mendukung program pengembangan pelatihan dan penyuluhan yaitu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya dalam pengelolaan kinerjanya, BPPP Bitung melakukan restrukturisasi SAKIP BPPP Bitung yang telah dapat meningkatkan efektifitas organisasi.

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan <http://kinerjaku.kkp.go.id>. dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 masing-masing perspektif sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) sebesar 0,24 rupiah miliar dari target yaitu sebesar 0,06 rupiah miliar dengan persentase 120%;
- Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;

2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan :

- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) tercapai 29,63 % dari target yaitu 25% atau dengan persentase capaian 118,52%;
- Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%) yaitu 100% dari target 86% atau dengan persentase capaian 116,28%;
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) yaitu 77% dari target 100% atau dengan persentase capaian 120%;
- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Jumlah usulan inovasi satker BPPP Bitung (Inovasi) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Nilai Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik BPPP Bitung (Nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;

3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :

- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok) sebanyak 2 kelompok dari target 1 kelompok atau dengan persentase 120%;
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 60 kelompok dari target yaitu 50 kelompok atau dengan persentase 120%;
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 2 kelompok dari target sebesar 1 kelompok atau dengan persentase 120%.
- Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit) sebanyak 1 kelompok dari target sebesar 1 kelompok atau dengan persentase 100%;
- Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;

Penyelenggaraan program dan kegiatan di BPPP Bitung secara umum telah terlaksana dengan baik dengan capaian sebesar 118,08 dan menghasilkan tingkat capaian seperti pada masing-masing sasaran kinerja di atas berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026. Capaian sasaran Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan kontribusi capaian atas 3 sasaran kegiatan dan 8 Indikator Kinerja Utama dari total 22 Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh BPPP Bitung. Secara umum kinerja BPPP Bitung sangat baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang merupakan Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan, tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari capaian ini, diharapkan kinerja di triwulan selanjutnya dapat lebih meningkat.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tahapan dalam siklus manajemen sebuah organisasi unsur pelaporan mempunyai peranan penting untuk mengetahui sampai sejauh mana hasil yang telah dicapai dari tujuan dari organisasi itu sendiri. Unsur pelaporan semakin penting seiring dengan adanya kebijakan sistem anggaran berbasis kinerja dan berkembangnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka perwujudan *Good Governance* diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Kewajiban instansi pemerintah untuk berakuntabilitas kinerja secara internal telah diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh instansi pemerintah setiap tahun wajib menyampaikan laporan informasi kinerja kepada unit kerja yang berada pada tingkat lebih tinggi secara berjenjang. BPPP Bitung sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada atasannya. Penyampaian laporan kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis BPPP Bitung, khususnya Penetapan Kinerja tahun 2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja ini juga ditujukan sebagai umpan balik untuk memperbaiki kinerja BPPP Bitung di masa yang akan datang.

1.2. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap K/L wajib melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2026 kepada Kepala BPPSDM KP melalui Kepala Pusat pelatihan dan Penyuluhan KP. Penyusunan LKJ BPPP Bitung Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPPP Bitung kepada Kepala BPPSDM KP atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan LKJ adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPPP Bitung selama Tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.3. Tugas dan Fungsi

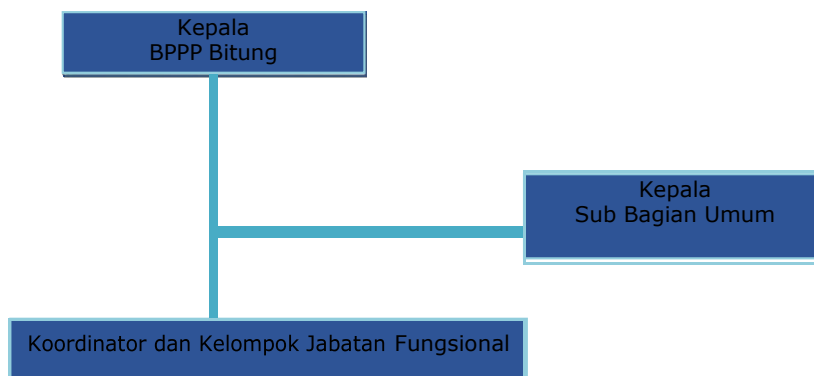
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, bahwa Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang selanjutnya disingkat BPPP, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Dalam Peraturan Menteri KP ini, terdapat 5 (lima) BPPP, salah satu diantaranya adalah BPPP Bitung. Selanjutnya setiap BPPP tersebut mempunyai tugas “melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan di bidang kelautan dan perikanan” dan dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPP kemudian menyelenggarakan sejumlah fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran serta pelaporan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
- c. Pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- d. Penyusunan materi, metodologi dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- e. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial di bidang perikanan;
- f. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- g. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), swadaya, dan swasta; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BPPP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan tugas masing-masing, sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Bitung sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.87/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung, Struktur Organisasi di BPPP Bitung dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Bitung

1.4. Keragaan SDM BPPP Bitung

Jumlah keseluruhan pegawai BPPP Bitung sampai dengan 31 Maret 2026 sebanyak 390 orang, terdiri dari CPNS 1 orang, PNS 246 orang, 122 orang PPPK, 8 orang PPPK Paruh Waktu, PJLP 13 orang. Keragaan SDM BPPP Bitung disajikan pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Keragaan SDM BPPP Bitung

ASN BPPP Bitung berdasarkan Golongan		
No.	Uraian	Jumlah
1	Golongan II	59
2	Golongan III	167
3	Golongan IV	21
4	Golongan VII	27
5	Golongan IX	94
6	Golongan X	1
	Jumlah	369

ASN BPPP Bitung berdasarkan Tingkat Pendidikan		
No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	28
2	D3	79
3	S1	216
4	D4	24
5	S2	22
	Jumlah	369

ASN BPPP Bitung berdasarkan Kelompok Umur									Jumlah
≤25	25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-57	>58	
0	23	55	89	82	61	34	19	6	369

ASN BPPP Bitung berdasarkan Jenis Kelamin				
No	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	CPNS/PNS	134	114	248
2	PPPK	81	40	121

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KKP, Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. Kata Pengantar, pada bagian ini menyajikan pengesahan dari Kepala Balai;
- b. Ringkasan Eksekutif, pada bagian ini menyajikan ringkasan isi dari laporan kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 yang berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala yang dihadapi;
- c. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di BPPP Bitung;
- d. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per sub bab yang berisi rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja triwulan I tahun 2026 serta Pengukuran Kinerja;
- e. Bab III Akuntabilitas Kinerja, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya;
- f. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026 dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.;
- g. Lampiran, disajikan perjanjian kinerja dan lampiran yang dianggap perlu.

1.6. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan. BPPP Bitung memiliki 2 (dua) kategori wilayah kerja/pengembangan yang sangat luas yaitu :

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada kegiatan pelatihan yang meliputi 7 Provinsi dengan 79 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), Sulawesi Barat (6 Kab), Sulawesi Selatan (24 Kab/Kota), Kalimantan Timur (10 Kab/Kota) dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota) dengan potensi dan peluang yang harus dikelola oleh BPPP Bitung;

- Wilayah pengembangan/kerja dalam pelaksanaan tugas pada kegiatan Penyuluhan atau sebagai Satminkal Penyuluh Perikanan yang meliputi 4 Provinsi dengan 39 Kabupaten/Kota, yaitu : Provinsi Sulawesi Utara (15 Kab/Kota), Gorontalo (6 Kab/Kota), Sulawesi Tengah (13 Kab/Kota), dan Kalimantan Utara (5 Kab/Kota).

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Bitung dalam mencapai tujuan organisasi :

- 1) Tersedianya SDM yang berlatar pendidikan formal yang memadai dan bersertifikat kompetensi dan keahlian serta berdedikasi;
- 2) Memiliki prasarana dan sarana yang dapat menunjang penyelenggaraan pelatihan dan penyuluhan;
- 3) Sebagian besar SDM BPPP Bitung memiliki usia muda yang produktif;
- 4) BPPP Bitung tersertifikasi SNI ISO 9001:2015;
- 5) Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu;
- 6) Adanya mandat dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan kepada BPPP Bitung sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK);
- 7) Tersedianya akses internet di lingkungan Balai.

Disamping potensi tersebut di atas terdapat peluang, sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam KP dengan meningkatkan kompetensi pelaku utama/usaha KP;
- 2) Adanya jenjang kerjasama pelatihan dengan lembaga lain;
- 3) Adanya tuntutan dunia kerja yang mempersyaratkan sertifikasi kompetensi kerja;
- 4) Adanya peluang peningkatan profesionalisme bagi tenaga pelatihan.

b. Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama stakeholder dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Bitung memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain :

- Aspek penyelenggaraan pelatihan KP :
 - Ketersediaan tenaga pelatih (Instruktur dan Widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa orang sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi
 1. Widyaiswara Pengolahan tersisa 2 orang di Tahun 2026
 2. Instruktur Mesin tersisa 2 orang di Tahun 2026
 3. Instruktur dan Widyaiswara Budidaya tersisa 4 orang di Tahun 2026
 4. Instruktur dan Widyaiswara Penangkapan tersisa 6 orang di Tahun 2026
 - Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;

- Aspek penyelenggaraan penyuluhan KP :
 - Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
 - Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam pengelolaan kinerja organisasi, BPPP Bitung melaksanakan secara terukur dan terstruktur dengan penekanan pada empat perspektif yang saling berimbang, yaitu *stakeholder perspective*, *Customer perspective*, *Internal Process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, BPPP Bitung telah melakukan penerapan pengelolaan kinerja secara penuh termasuk melakukan penyempurnaan dalam rangka mendukung penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPPP Bitung dan pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

2.1. Rencana Kerja Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dalam masa transisi sekaligus menjadi langkah awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 sesuai Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RKP ini menjadi upaya krusial dalam menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis, dan tanggap terhadap perubahan global. Dengan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", RKP 2025 diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui peningkatan Indeks Modal Manusia dan Nilai Tukar Nelayan, serta komitmen kuat untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.

Implementasi visi nasional tersebut secara sektoral dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (Renstra KKP) Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025. Dokumen ini menjadi kompas bagi pembangunan sektor kelautan yang berbasis ekonomi biru, di mana keberlanjutan ekosistem laut berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sebagai motor penggerak transformasi kualitas aparatur dan masyarakat kelautan dan perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) turut menetapkan arah kebijakan melalui Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPPSDM KP Tahun 2025-2029. Melalui integrasi perencanaan ini, pengembangan kompetensi SDM diharapkan mampu menjawab tantangan industri dan menjadi kunci utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang inklusif di sektor kelautan dan perikanan.

2.1.1. Arah dan Kebijakan KKP

Arah dan kebijakan KKP Tahun 2026 dilaksanakan dengan prinsip ekonomi biru sebagaimana tuntutan pembangunan global, terdiri atas:

1. Memperluas kawasan konservasi laut;
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota penangkapan ikan;
3. Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan;
4. Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
5. pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan *advanced technology*; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

2.1.2. Visi, Misi dan Tujuan BPPSDMKP

- Visi BPPSDMKP

BPPSDMKP merumuskan visi spesifik yaitu Terwujudnya Sdm Kelautan Dan Perikanan Yang Inovatif, Kompeten, Dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional Dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan Dan Perikanan. Visi tersebut menegaskan peran fundamental BPPSDMKP dalam membangun kapasitas manusia yang mampu menjawab tantangan kontemporer sektor kelautan dan perikanan. SDM yang inovatif akan mendorong lahirnya kreativitas serta adaptasi terhadap dinamika perubahan. SDM yang dimaksud adalah SDM pelaku usaha yang inovatif dan berdaya saing serta SDM calon tenaga kerja yang kompeten yang akan memastikan relevansi keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). SDM yang berdaya saing memperkokoh posisi Indonesia dalam arena global yang sarat kompetisi.

- Misi BPPSDMKP

KKP mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Misi tersebut disusun untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” yang melaksanakan Asta Cita 2 dan 8;

2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan” yang melaksanakan Asta Cita 2, 3, 5, dan 6;
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan Asta Cita 4;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas yang melaksanakan Asta Cita 7;

Dalam melaksanakan misi KKP ke-3 yaitu “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Kelautan dan perikanan”. Dalam dukungan terhadap pelaksanaan misi tersebut, BPPSDMKP menetapkan misi yaitu “Mewujudkan SDM Kelautan dan Perikanan yang Inovatif, Kompeten, dan Berdaya Saing ditingkat Nasional dan Internasional”.

- Tujuan BPPSDMKP

Untuk mewujudkan Misi BPPSDM Tahun 2025-2029 disusun tujuan yaitu “Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP yang Inovatif, Kompeten dan Berdaya Saing” dengan indikator meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dari 70 pada tahun 2025 menjadi 78 pada tahun 2029. Fokus utama tujuan strategis terletak pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang inovatif, kompeten, dan berdaya saing. Pencapaian tujuan ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya pelaku usaha baru yang inovatif dan berdaya saing, kelembagaan kelompok pelaku usaha yang kuat dan mandiri serta menghasilkan calon wirausaha muda baru yang berlatar belakang pendidikan serta menjawab kebutuhan calon tenaga kerja melalui adanya keterhubungan lebih kuat antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Selain itu, tujuan juga diarahkan untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3. Program Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan program kerja tahun 2025-2029, integrasi kebijakan dilakukan dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025. Program-program yang dicanangkan difokuskan pada penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar ekonomi biru yang kompetitif dan berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi program kerja tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas perikanan secara nasional, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian target makro dalam RKP 2025, khususnya peningkatan Nilai Tukar Nelayan dan pengentasan kemiskinan di wilayah pesisir.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan program kerja di bidang pengembangan kapasitas dikawal melalui Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025. Fokus

utama program kerja tahun 2025 mencakup akselerasi pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang berbasis pada inovasi teknologi serta kebutuhan industri (digitalisasi perikanan). Dengan mengacu pada Renstra BPPSDM KP tersebut, seluruh kegiatan diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi agen transformasi ekonomi, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana amanat pemerintah dapat terwujud melalui SDM kelautan dan perikanan yang kompeten dan berdaya saing global.

2.1.4. Tujuan

Tujuan pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung merupakan penjabaran strategis dari kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025. Selain itu, arah tujuan ini merujuk secara teknis pada Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025, serta selaras dengan sasaran strategis Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Serta Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

1. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
2. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan;
3. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing, dan;
4. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.5. Sasaran

Penyusunan sasaran kegiatan pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Bitung merupakan wujud kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Renstra KKP 2025-2029, khususnya pada SS-4 mengenai Meningkatnya Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan serta SS-5 terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas. Sasaran strategis tersebut kemudian diturunkan menjadi Sasaran Program (SP) melalui Peraturan Kepala BPPSDM KP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Renstra BPPSDM KP 2025-2029, yang berfokus pada SP-1 yaitu Meningkatnya

Kapasitas dan Kompetensi SDM KP, serta SP-2 mengenai Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel di Lingkungan BPPSDM.

Dalam rangka mencapai target tersebut, BPPP Bitung menetapkan tiga Sasaran Kegiatan utama yang dirancang secara sistematis untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas modal manusia dan ekonomi masyarakat pesisir. Pertama, melalui terselenggaranya pelatihan kelautan dan perikanan yang berkualitas guna memenuhi target persentase lulusan yang kompeten dan tersertifikasi agar terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDIKA). Kedua, penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di bidang penyuluhan dan pengembangan SDM KP untuk menjamin transparansi serta kualitas layanan publik. Ketiga, optimalisasi penyelenggaraan penyuluhan kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk memicu persentase peningkatan omzet kelompok pelaku utama. Sinergi antara kebijakan strategis dan operasional ini memastikan bahwa seluruh program kerja BPPP Bitung berjalan selaras dengan agenda prioritas nasional dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.

BPPP Bitung memiliki 3 (tiga) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan dalam 18 (Delapan Belas) Indikator Kinerja program pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan beserta target yang akan dicapai Tahun 2025-2029.

Sasaran Kegiatan pertama (SK-1) yang akan dicapai adalah " Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan ", dengan Indikator Kinerja :

1. Persentase Lulusan Pelatihan KP Kompeten Satker BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (%) dengan target sebesar 75% pada Tahun 2025 dan 79% pada Tahun 2029 .
2. Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) dengan target sebesar 2.437 orang pada Tahun 2025 dan 4.232 orang pada Tahun 2029.
3. Nilai PNPB Satker BPPP Bitung (Rupiah Miliar) dengan target sebesar 0.17 rupiah miliar pada tahun 2025 hingga tahun 2029.

Sasaran Kegiatan kedua (SK-2) yang akan dicapai adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan target sebesar 100% pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
2. Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) dengan target sebesar 83 pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan target sebesar 85% pada tahun 2025 dan 89% pada tahun 2029.

4. Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) dengan target sebesar 81 pada tahun 2025 dan 83 pada tahun 2029.
5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BPPP Bitung (%) dengan target sebesar 80% pada tahun 2025 dan 84% pada tahun 2029.
6. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan target sebesar 80% pada tahun 2025 dan 84% pada tahun 2029.
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target sebesar 92 pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) dengan target sebesar 71,5 pada tahun 2025 hingga tahun 2029.

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-3) Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dengan indikator kinerja :

1. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan target sebesar 2.998 kelompok pada tahun 2025 dan 4.353 kelompok pada tahun 2029.
2. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target sebesar 80 kelompok pada tahun 2025 dan 121 kelompok pada tahun 2029.
3. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan target sebesar 296 kelompok pada tahun 2025 dan 369 kelompok pada tahun 2029.
4. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit) dengan target sebesar 27 unit pada tahun 2025 dan 198 unit pada tahun 2029.
5. Media Penyuluhan Sesuai dengan Kebutuhan Pelaku Usaha di Satker BPPP Bitung (paket) dengan target sebesar 1 paket pada tahun 2025 hingga tahun 2029.
6. Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) dengan tidak ada target pada tahun 2025 dan 43 orang pada tahun 2029.
7. Jumlah Penyuluh Kelautan dan Perikanan yang Lulus Pelatihan Teknis di BPPP Bitung (orang) dengan target sebesar 8 orang pada tahun 2025 hingga tahun 2029.

2.2. Rencana Kegiatan Tahun 2026

Tahun 2026 BPPP Bitung melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 68.490.778.000,- dengan rincian kegiatan, yaitu :

Tabel 2. Rencana Kegiatan Tahun 2026

NO	Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
I	DL Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	12.139.625.000
	1. DL.2375 Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9.842.525.000
	2. DL.7020 Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.297.100.000
II	WA Program Dukungan Manajemen	56.351.153.000
	1. WA.2378 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	56.351.153.000
Total Anggaran		68.490.778.000,-

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Dalam upaya untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi BPPSDM KP harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Berdasarkan, visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan Sasaran Kegiatan BPPP Bitung. Berkaitan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga BPPP Bitung memiliki 2 perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja dengan Pusat Pelatihan dan Pusat Penyuluhan. Adapun Perjanjian Kinerja BPPP Bitung pada Tahun 2026 sebagai berikut :

2.3.1. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2026.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja BPPP Bitung Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Tersempai di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	800
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)	1
		6	Nilai PNBK Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,13
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	81
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%)	86

		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)	71
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	108
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	3.940
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	335
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)	33
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket)	1
		22	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	2

2.4. Pengukuran Kinerja

2.4.1 Rumus Pengukuran

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada manual IKU pada masing-masing indikator. Perhitungan Indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Nilai 100 – 120 adalah kategori istimewa dengan kode warna biru;
2. Nilai 90 - < 110 adalah kategori baik dengan kode warna hijau;
3. Nilai 70 - < 90 adalah kategori cukup dengan kode warna kuning;
4. Nilai 50 - < 70 adalah kategori kurang dengan kode warna merah;
5. Untuk nilai < 50 adalah kategori sangat kurang dengan kode warna hitam; Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - < 110
Cukup	Nilai 70 - < 90
Kurang	Nilai 50 - < 70
Sangat kurang	Untuk nilai < 50

Gambar 2. Indeks Capaian IKU

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing- masing Indikator.

2.4.2 Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja BPPP Bitung dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga)

bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran dan pelaporan kinerja telah ditugaskan dan ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPPP Bitung Nomor : B.27/BPPP.BTG/RC.610/I/2026 tanggal 7 Januari 2026 yaitu Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Tahun 2026. Keanggotaan tim terdiri dari pegawai yang memiliki kualifikasi terkait pengukuran dan pelaporan kinerja dibuktikan dengan sertifikat.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026

Pelaksanaan evaluasi kinerja BPPP Bitung pada tahun anggaran 2026 dilakukan melalui analisis komparatif antara target yang telah direncanakan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) pada setiap perspektif organisasi. Seluruh proses dokumentasi dan validasi data pengukuran kinerja tersebut diintegrasikan melalui sistem informasi resmi pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil pengukuran sistematis tersebut, BPPP Bitung berhasil mencatatkan nilai capaian kinerja sebesar 118,08%. Capaian ini direpresentasikan melalui Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan indikator warna biru, yang menunjukkan bahwa seluruh target yang ditetapkan sepanjang Triwulan I Tahun 2026 tidak hanya berhasil direalisasikan, tetapi juga dicapai dengan predikat Istimewa. Sebagaimana tertera pada Gambar 3, hasil ini mencerminkan keberhasilan institusi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal melampaui standar kinerja yang telah ditentukan.



Gambar 3. Skor Kinerja BPPP Bitung Tahun 2026

Sumber : kinerjaku.kkp.go.id

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Bitung. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang

didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategis BPPP Bitung yang menjadi kontrak kerja pada Tahun 2026 dapat dicapai.

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja BPPP Bitung Triwulan I Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET PK 2026	TARGET TW I 2026	REALISASI TW I 2026	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	Terselenggara nya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608	-	-	-
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75	-	-	-
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	800	-	-	-
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)	1	-	-	-
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)	1	-	-	-
		6	Nilai PNPB Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,13	0,06	0,24	120,00
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1	-	-	-
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen)	1	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100	25	29,63	118,52
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83	-	-	-
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	81	-	-	-
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%)	86	86	100	116,28
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	77	77	100	120,00
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)	71	-	-	-
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92	-	-	-
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5	-	-	-
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	108	1	2	120,00
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	3.940	50	60	120,00
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	335	1	2	120,00
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)	33	1	1	100,00
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket)	1	-	-	-
		22	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	2	-	-	-

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan

- **IKSK.01.01 Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)**

IKU Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I.

- **IKSK.01.02 Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)**

IKU Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) tidak terdapat target pada Triwulan I.

- **IKSK.01.03 Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)**

IKU Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I.

- **IKSK.01.04 Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)**

IKU Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen) tidak terdapat target pada Triwulan I.

- **IKSK.01.05 Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)**

IKU Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal) tidak terdapat target pada Triwulan I.

- **IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)**

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 5. Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)

Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan									
IKSK.01.06 Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)									
Realisasi Capaian Triwulan I				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022 - 2025				Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	0,11	0,11	0,06	0,06	0,24	120,00	300,00	0,17	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 5, Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut belum tersedia pada tahun 2022 (IKU baru tahun 2023). Pengukuran kinerja baru diimplementasikan pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 0,11 rupiah miliar dan tahun 2024 dengan capaian yang sama dengan tahun 2023 yaitu 0,11 rupiah miliar. Pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian pada triwulan I yaitu 0,06 rupiah miliar yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi serta blokir anggaran dalam Pelatihan Keahlian Bidang Kepelautan yang diblokir 100%. Sementara itu, pada tahun 2026 terjadi peningkatan capaian yang signifikan menjadi 0,24 rupiah miliar sehingga terjadi kenaikan tahun 2026 dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 300%. Jika melihat target 2029 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025 – 2029 yaitu 0,17 rupiah miliar, capaian terhadap target 2029 tersebut telah mencapai 120%. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena belum tersedianya institusi dengan kompetensi yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 6. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)
dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (Rupiah Miliar)	Realisasi Capaian Satker (Rupiah Miliar)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	0,01	0,29	120,00
2	BPPP Tegal	4,05	5,46	120,00
3	BPPP Banyuwangi	0,03	0,21	120,00
4	BPPP Ambon	0,03	0,04	120,00
5	BPPP Bitung	0,06	0,24	120,00

Berdasarkan data capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan BPPSDMKP, seluruh satuan kerja menunjukkan performa positif dengan keberhasilan melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Bitung mencatatkan realisasi sebesar 0,24 miliar rupiah dari target 0,06 miliar rupiah, yang menghasilkan persentase capaian sebesar 120,00%. Tingkat efektivitas kinerja ini setara dengan BPPP Tegal, yang mencatatkan realisasi nominal tertinggi sebesar 5,46 miliar rupiah, BPPP Medan dengan realisasi sebesar 0,29 miliar rupiah, dan BPPP Banyuwangi dengan realisasi 0,21 miliar rupiah, di mana ketiganya juga mencapai persentase 120,00%. Sementara itu, BPPP Ambon mencatatkan realisasi sebesar 0,04 miliar

rupiah dengan persentase capaian yang juga berada di angka 120,00%. Secara keseluruhan, data ini menegaskan bahwa BPPP Bitung memiliki tingkat efisiensi pencapaian target yang sangat kompetitif dan berada pada kelompok performa tertinggi bersama seluruh satuan kerja BPPP lainnya yang secara serentak berhasil mencapai pagu persentase maksimal 120,00%.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga meningkatkan daya tarik layanan bagi pengguna jasa, serta didorong oleh komitmen kuat pimpinan dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan meliputi peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan serta perluasan promosi melalui media sosial. Meskipun perolehan PNBP sangat bergantung pada fluktuasi pemanfaatan layanan oleh pemangku kepentingan dan ketersediaan fasilitas sehingga sulit diprediksi secara pasti setiap periodenya, BPPP Bitung tetap berupaya mengoptimalkan potensi yang ada. Pada tahun 2026, strategi peningkatan PNBP difokuskan pada pemanfaatan hasil samping pengolahan perikanan, sewa rumah dinas, area foodcourt, asrama, ruang koperasi, serta retribusi karcis masuk eduwisata. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu pemantauan capaian PNBP dari Aplikasi SIMPONI berjumlah 3 dokumen dan OMSPAN berjumlah 3 dokumen dengan Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini dikontribusikan melalui :

1. Penjualan Hasil Budidaya
2. Penjualan Peralatan dan Mesin
3. Layanan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan
4. Penggunaan Sarana dan Prasarana Sesuai dengan Tusi
5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang lalu

Sasaran Kegiatan 2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

• IKSK.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Layanan Dukungan manajemen internal meliputi dokumen rekap realisasi anggaran, matrik manajemen resiko, Laporan SPIP, Laporan keuangan, laporan BMN, RKBMN 2026, laporan kepegawaian dan laporan PIPK 2025.

Tabel 7. Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.02.01 Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian Triwulan I 2022 - 2025				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	31,66	28,33	25,00	29,36	118,52	3,64	100,00	29,36

Berdasarkan data pada tabel 7, BPPP Bitung menunjukkan kinerja yang sangat impresif dan melampaui target dalam memberikan layanan dukungan manajemen internal pada Triwulan I Tahun 2026. Selama periode realisasi capaian Triwulan I dari tahun 2024 hingga 2025, angka capaian secara konsisten berada di atas ambang batas 25%. Pada TW I Tahun 2026, BPPP Bitung berhasil mencatatkan Realisasi sebesar 29,36%, yang mana angka ini telah melampaui Target TW I 2026 yang ditetapkan sebesar 25,00%. Capaian ini menghasilkan persentase capaian sebesar 118,52%, menunjukkan efektivitas kerja yang tinggi di awal tahun. Tren positif ini juga terlihat dari adanya kenaikan performa sebesar 3,64% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Kondisi ini membuktikan komitmen BPPP Bitung dalam menjaga akselerasi pelayanan secara berkelanjutan. Jika dibandingkan dengan Target Rencana Kegiatan Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 100,00%, maka realisasi saat ini telah menyumbang 29,36% dari total target jangka panjang tersebut. Hal ini memperkuat posisi BPPP Bitung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel sesuai dengan rencana strategis 2025–2029. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 8. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	25,00	29,36	118,52
2	BPPP Tegal	25,00	29,36	118,52
3	BPPP Banyuwangi	25,00	29,36	118,52
4	BPPP Ambon	25,00	25,93	103,72
5	BPPP Bitung	25,00	29,36	118,52

Berdasarkan data pada tabel 8, seluruh satuan kerja menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian yang umumnya melampaui target yang telah ditetapkan. BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, dan BPPP Bitung masing-masing mencatatkan realisasi capaian sebesar 29,36%, sehingga berhasil melampaui target

awal sebesar 25,00% dengan persentase realisasi capaian yang sangat tinggi, yaitu 118,52%. Sementara itu, BPPP Ambon juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi capaian sebesar 25,93%, yang berarti tetap melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian, persentase realisasi capaian BPPP Ambon tercatat sebesar 103,72%, sedikit lebih rendah dibandingkan satuan kerja lainnya. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa seluruh BPPP mampu menjalankan program dan layanan internal secara efektif. Meskipun terdapat sedikit perbedaan pada tingkat persentase capaian, kinerja antar satuan kerja tetap berada pada kategori sangat memuaskan karena seluruhnya berhasil melampaui target yang telah direncanakan. Keseragaman capaian yang melampaui target ini juga mencerminkan adanya kinerja yang konsisten dan kompetitif antar satuan kerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja secara umum berada pada kategori sangat memuaskan. Faktor Pendukung Keberhasilan BPPP Bitung dalam melampaui target IKU pada awal tahun 2026 ini didorong oleh koordinasi yang solid dan kerja sama sinergis antar pegawai. Secara teknis, hal ini dibuktikan melalui :

1. Penyajian laporan yang berkualitas dan didukung data yang lengkap.
2. Penginputan data capaian yang selalu tepat waktu.
3. Pegawai yang terampil hasil dari berbagai bimbingan teknis dan pelatihan, serta penggunaan aplikasi pelaporan yang optimal.

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu melalui penyelesaian sejumlah program dan dokumen penting, antara lain:

1. Layanan perkantoran (pembayaran gaji dan tunjangan) sejumlah 1 dokumen
2. Laporan Keuangan sejumlah 1 laporan
3. Laporan PIPK sejumlah 1 laporan
4. Dokumen realisasi anggaran sejumlah 3 dokumen
5. Laporan SPIP sejumlah 1 laporan
6. Matrik Manajemen Resiko sejumlah 1 dokumen
7. Laporan BMN sejumlah 1 laporan

Untuk menjaga agar tren positif ini berlanjut hingga akhir tahun 2026, BPPP Bitung menerapkan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Evaluasi rutin dengan melaksanakan rapat monitoring mingguan untuk memantau progres, serta evaluasi triwulanan untuk menentukan langkah perbaikan.
2. Pemantauan Intensif dengan Melakukan pengawasan ketat terhadap penyelesaian dokumen agar tidak ada kendala administrasi di kemudian hari.
3. Transparansi dengan Menyusun laporan dukungan manajerial secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan upaya meningkatkan efisiensi operasional.

IKSK.02.02 Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)

IKU Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) tidak terdapat target pada Triwulan I.

IKSK.02.03 Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)

IKU Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I.

IKSK.02.04 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung merupakan rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP dari hasil audit, reviu dan evaluasi yang telah diterbitkan (selama periode pengukuran) ditindaklanjuti secara tuntas oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Capaian IKU Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 9. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.02.04 Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian Triwulan I 2022 - 2025				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
100	75	82	85	86	100	116,28	17,65	89	112,36

Berdasarkan data pada tabel 9, BPPP Bitung menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Melihat tren realisasi periode 2022–2025, indikator ini menunjukkan pergerakan yang dinamis; dimulai dari angka 100% pada tahun 2022, sempat turun ke 75% pada tahun 2023, namun kemudian terus merangkak naik secara konsisten 82% pada tahun 2024 hingga mencapai 85% pada tahun 2025. Pada Triwulan I Tahun 2026, BPPP Bitung menetapkan target sebesar 86,00% dan berhasil mencatatkan realisasi yang luar biasa sebesar 100,00%. Capaian ini menghasilkan persentase kinerja sebesar 116,28%, yang berarti melampaui target awal secara signifikan. Selain itu, terdapat kenaikan performa sebesar 17,65% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama di tahun 2025. Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2029 pada Rencana Kegiatan 2025–2029 yang dipatok sebesar 89,00%, maka realisasi saat ini justru sudah melampauinya dengan persentase capaian terhadap target 2029 mencapai 112,36%. Hal ini mencerminkan bahwa tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di BPPP

Bitung berjalan sangat progresif dan melampaui ekspektasi perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 10. Perbandingan realisasi Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capain Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	86,00	86,00	100,00
2	BPPP Tegal	86,00	100,00	116,28
3	BPPP Banyuwangi	86,00	86,00	100,00
4	BPPP Ambon	86,00	100,00	116,28
5	BPPP Bitung	86,00	100,00	116,28

Berdasarkan data perbandingan satuan kerja BPPP di lingkup BPPSDMKP, seluruh unit kerja menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam menindaklanjuti hasil pengawasan. Setiap satuan kerja berhasil memenuhi atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 86,00%. BPPP Bitung bersama dengan BPPP Tegal dan BPPP Ambon mencatatkan performa paling unggul dengan realisasi maksimal mencapai 100,00%, yang menghasilkan persentase capaian tertinggi sebesar 116,28%. Di sisi lain, BPPP Medan dan BPPP Banyuwangi juga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil dengan realisasi tepat di angka 86,00%, sehingga keduanya berhasil mencapai tingkat pemenuhan target sebesar 100,00%.

Hasil ini merefleksikan adanya keseriusan kolektif di lingkungan BPPSDMKP, khususnya bagi BPPP Bitung, dalam mendayagunakan hasil pengawasan sebagai instrumen untuk mendorong perbaikan kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel. Keberhasilan pencapaian IKU terkait pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan ini didukung secara teknis oleh ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penggunaan aplikasi SIDAK KKP. Sistem ini berperan krusial dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Sebagai langkah penguatan, BPPP Bitung melaksanakan kegiatan strategis berupa peningkatan kompetensi bagi operator pengelola aplikasi SIDAK KKP. Melalui penguatan kapasitas tersebut, pengelolaan dan penginputan data dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga progres capaian IKU tahunan dapat terpantau secara akurat dan berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Penyiapan data dukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pengawasan internal KKP berjumlah 1 dokumen.

IKSK.02.05. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tabel 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)

Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan									
IKSK.02.05. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)									
Realisasi Capaian Triwulan I 2022 - 2025				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	100	77	100	120,00	-	84	119,05

Berdasarkan data pada tabel 11, capaian kinerja BPPP Bitung pada indikator persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada sistem SIRUP untuk Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan tingkat efektivitas yang melampaui sasaran. Dari target yang ditetapkan untuk Triwulan I sebesar 77,00%, BPPP Bitung berhasil mencatatkan realisasi optimal sebesar 100,00%. Keberhasilan tersebut menghasilkan persentase capaian terhadap target sebesar 120,00%, yang menandai performa awal tahun yang sangat positif mengingat indikator ini merupakan parameter kinerja baru yang diimplementasikan pada tahun 2025 dengan capaian 100%. Dari hasil diatas, tidak terdapat kenaikan pada triwulan I tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2025. Pencapaian ini menegaskan komitmen kuat BPPP Bitung dalam menjunjung tinggi prinsip transparansi serta akuntabilitas pada proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak tahap perencanaan.

Pencapaian pada Triwulan I 2026 ini juga terlihat sangat progresif jika disandingkan dengan rencana jangka panjang. Jika dibandingkan dengan Target Tahun 2029 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung periode 2025–2029 yang sebesar 84,00%, maka realisasi saat ini telah mencapai persentase capaian terhadap target 2029 sebesar

119,05%. Hal ini membuktikan bahwa BPPP Bitung telah melampaui ekspektasi target masa depan, sekaligus memastikan tata kelola pengadaan yang kredibel dan tepat waktu. Mengingat realisasi kinerja indikator ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan realisasi Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (%)	Realisasi Capaian Satker (%)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	77,00	100,00	120,00
2	BPPP Tegal	77,00	100,00	120,00
3	BPPP Banyuwangi	77,00	100,00	120,00
4	BPPP Ambon	77,00	100,00	120,00
5	BPPP Bitung	77,00	100,00	120,00

Berdasarkan data pada tabel 12, kinerja seluruh satuan kerja di lingkup BPPSDMKP menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan seragam pada indikator pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui sistem SIRUP. Seluruh unit kerja, yang meliputi BPPP Medan, BPPP Tegal, BPPP Banyuwangi, BPPP Ambon, dan BPPP Bitung, berhasil mencapai tingkat pengumuman optimal sebesar 100,00%. Dengan target capaian Triwulan I yang ditetapkan sebesar 77,00%, seluruh satuan kerja secara konsisten mencatatkan persentase realisasi sebesar 120,00%. Capaian ini menegaskan kepatuhan penuh serta transparansi yang tinggi dari seluruh BPPP dalam proses perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sejak awal tahun anggaran. Secara keseluruhan, hasil tersebut merefleksikan efektivitas tata kelola administrasi dan kedisiplinan yang luar biasa terhadap regulasi pengadaan, yang menjadi fondasi positif bagi kelancaran seluruh kegiatan di bidang kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2026.

Keberhasilan BPPP Bitung dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) didorong oleh sinergi antara komitmen kuat pimpinan dan dukungan tenaga PBJ yang kompeten dalam menyusun serta mengumumkan RUP secara tepat waktu sesuai regulasi LKPP. Faktor keberhasilan ini diperkuat oleh perencanaan PBJ yang matang dan pelaksanaan tahapan pengadaan yang disiplin sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna menghindari penumpukan beban kerja di akhir periode. Selain itu, penguasaan teknis dalam optimalisasi sistem SIRUP yang dibarengi dengan sistem pengendalian internal yang ketat, pemantauan progres input data secara intensif, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala, memastikan bahwa seluruh proses tidak hanya berjalan efisien tetapi juga menjaga akuntabilitas dan transparansi secara berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Pengelolaan aplikasi SIRUP berjumlah 1 dokumen.

IKSK.02.06 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)

IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I.

IKSK.02.07 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

IKU Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I.

IKSK.02.08 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)

IKU Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I.

Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

IKSK.03.01 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar ekonomi krusial yang menuntut profesionalisme serta adaptabilitas tinggi dari para pelakunya. Di tengah dinamika pasar global dan perkembangan teknologi industri 4.0, peran kelompok pelaku usaha dan pelaku pendukung menjadi akselerator utama dalam menjaga kedaulatan pangan serta kesejahteraan masyarakat pesisir. BPPP Bitung, sebagai institusi yang berdedikasi dalam pengembangan sumber daya manusia, memandang bahwa keberlanjutan sektor ini tidak hanya bergantung pada kekayaan sumber daya alam, tetapi juga pada kapasitas kelembagaan kelompok tersebut. Peningkatan kelas kelompok dipandang bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah transformasi fundamental untuk mengubah kelompok dari unit sosial menjadi unit ekonomi yang mandiri dan berdaya saing.

Program peningkatan kelas kelompok yang diinisiasi oleh BPPP Bitung menysasar berbagai aspek vital guna memperkuat struktur organisasi agar lebih transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup penguatan manajerial dan tata kelola, adopsi inovasi teknologi perikanan yang lebih efektif dan ramah lingkungan pada sisi teknis produksi, serta upaya menjembatani akses permodalan dan pasar agar kelompok mampu menjangkau skema pembiayaan formal dan rantai pasok yang lebih luas. Melalui pendampingan intensif dan penyuluhan yang terukur, BPPP Bitung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang mengalami peningkatan kelas memiliki daya tahan terhadap tantangan ekonomi, sekaligus mampu menjadi model percontohan bagi komunitas perikanan lainnya di wilayah kerja BPPP Bitung.

Tabel 13. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKSK.03.01 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)									
Realisasi Capaian Triwulan I				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022 - 2025				Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
2022	2023	2024	2025						
-	-	-	2	1	2	120,00	-	121	1,65

Berdasarkan realisasi pada Triwulan I tahun 2026, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029, capaian saat ini telah menyentuh angka 1,65%. Meskipun secara persentase kumulatif terhadap target jangka panjang masih berada pada tahap awal, kinerja pada tahun berjalan menunjukkan performa yang sangat impresif. Hal ini dibuktikan dengan realisasi Triwulan I 2026 yang mencapai 2 kelompok dari target yang ditetapkan sebesar 1 kelompok, atau merepresentasikan tingkat efektivitas sebesar 120,00%. Keberhasilan melampaui target triwulanan ini menegaskan konsistensi instansi dalam mempercepat peningkatan kapasitas pelaku usaha kelautan dan perikanan, di mana capaian Triwulan I 2026 ini berhasil mempertahankan angka yang sama dengan realisasi Triwulan I pada tahun 2025. Adapun distribusi kelompok yang berhasil ditingkatkan kelasnya yaitu sebanyak 2 kelompok dari semula kelas Lanjut menjadi Kelas Madya. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	-	-	-
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	5	6	120,00
4	BPPP Ambon	10	13	120.00
5	BPPP Bitung	1	2	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 14, capaian indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat impresif dan melampaui ekspektasi. Secara spesifik,

BPPP Ambon mencatatkan realisasi tertinggi dengan peningkatan kelas bagi 13 kelompok dari target 10 kelompok. Selanjutnya, BPPP Banyuwangi berhasil merealisasikan 6 kelompok dari target 5 kelompok, dan BPPP Bitung merealisasikan 2 kelompok dari target 1 kelompok. Seluruh pencapaian tersebut secara seragam menyentuh angka efektivitas 120,00%. Adapun BPPP Medan dan BPPP Tegal tidak memiliki nilai realisasi dalam tabel ini, yang mengindikasikan bahwa pada periode tersebut kedua satuan kerja tersebut tidak menetapkan target untuk indikator peningkatan kelas kelompok. Hasil ini menegaskan komitmen kuat dari balai-balai yang terlibat dalam memenuhi dan melampaui sasaran kinerja yang telah ditetapkan secara optimal. Keberhasilan pencapaian IKU ini didorong oleh berbagai kegiatan strategis, di antaranya pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara intensif bagi para penyuluh perikanan di wilayah kerja BPPP Bitung. Proses pendampingan tersebut dilakukan secara hybrid, baik melalui kunjungan lapangan secara langsung maupun melalui koordinasi secara daring, guna memastikan validitas data dan kualitas pembinaan di tingkat kelompok tetap terjaga.

Keberhasilan peningkatan kelas kelompok ini tidak hanya merupakan pencapaian kuantitatif, tetapi juga mencerminkan peran aktif pelaku utama dan pelaku usaha sebagai subjek penggerak dalam pengelolaan sumber daya serta pembentukan kelembagaan yang mandiri. Efektivitas program ini didukung oleh keterlibatan Penyuluh Perikanan baik penyuluh perikanan PNS maupun penyuluh perikanan PPPK dan PPPK Paruh Waktu yang tersebar secara strategis di wilayah kerja masing-masing. Selain itu, kesuksesan kinerja didorong oleh sistem pelaporan yang berkelanjutan melalui rapat rutin mingguan guna sinkronisasi data IKU dan pemenuhan standar administratif terbaru, termasuk validasi sertifikat kenaikan kelas oleh pejabat setingkat Camat atau Kepala Dinas. Penggunaan instrumen perhitungan sistematis serta penerapan verifikasi ganda juga dilakukan untuk meminimalisir kesalahan data dukung dan memastikan akurasi pelaporan.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, BPPP Bitung menetapkan beberapa strategi utama, antara lain melalui pendampingan kontinu oleh tenaga penyuluh pada setiap wilayah binaan guna menjamin kedekatan asistensi dengan pelaku usaha. Selain itu, dilakukan identifikasi terukur untuk mengklasifikasikan peningkatan kelas kelompok secara presisi berdasarkan kriteria objektif, serta memperkuat legalisasi formal melalui pengukuhan kelembagaan dengan Surat Keputusan yang diverifikasi oleh pejabat pemerintah daerah yang berwenang. Melalui implementasi strategi tersebut, diharapkan kelompok usaha perikanan dapat bertransformasi menjadi unit ekonomi yang lebih berkembang, mandiri, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan anggota serta pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Penilaian

kelas kemampuan kelompok dan Penguatan kelompok naik kelas berjumlah 2 kelompok.

IKSK.03.02. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)

Sektor kelautan dan perikanan merupakan pilar utama ekonomi nasional yang menuntut pengelolaan profesional dan berkelanjutan. Di tengah dinamika industri global, BPPP Bitung hadir sebagai akselerator transformasi bagi masyarakat pesisir. Melalui fungsi penyuluhan yang intensif, BPPP Bitung mendampingi para Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung agar mampu bertransformasi dari cara-cara tradisional menuju tata kelola yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi. Penyuluhan yang dilakukan oleh BPPP Bitung tidak hanya menyasar individu, tetapi difokuskan pada penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan pembinaan kelompok. Kelompok-kelompok ini menjadi wadah kolektif untuk bertukar ilmu, memperkuat posisi tawar di pasar, serta mempermudah akses terhadap teknologi dan permodalan. Melalui pendampingan yang berkelanjutan, BPPP Bitung berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kelompok yang disuluh tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu naik kelas menjadi entitas bisnis yang mandiri. Dengan membekali mereka melalui literasi digital, wawasan konservasi, dan inovasi teknologi tepat guna, BPPP Bitung optimis dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang selaras dengan prinsip Ekonomi Biru.

Tabel 15. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKSK.03.02 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)									
Realisasi Capaian Triwulan I 2022 - 2025				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
240,00	150,00	350,00	11,00	50,00	60,00	120,00	445,45	4.353,00	1,38

Berdasarkan data pada tabeln 15, jumlah kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan yang disuluh menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2022 hingga 2025. Volume pembinaan kelompok dimulai dengan 240 kelompok pada tahun 2022, sempat menurun pada tahun 2023, kemudian melonjak signifikan ke angka 350 kelompok pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terdapat penurunan realisasi yang tajam menjadi 11 kelompok. Memasuki tahun 2026, kinerja penyuluhan menunjukkan tren pemulihan yang sangat positif, di mana pada Triwulan I 2026 saja, BPPP Bitung telah berhasil merealisasikan pembinaan terhadap 60 kelompok dari target sebesar 50 kelompok. Capaian triwulanan ini menghasilkan persentase efektivitas sebesar 120,00% terhadap target periode tersebut dan mencatatkan

kenaikan yang sangat signifikan sebesar 445,45% jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025. Berdasarkan realisasi tahun berjalan 2026 (Triwulan I), jika dibandingkan dengan target tahun 2029 dalam Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029 yaitu sebesar 4.353 kelompok, maka capaian terhadap target jangka panjang tersebut saat ini berada pada angka 1,38%.

Penurunan capaian pada tahun 2025 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan kebijakan, antara lain penyesuaian persyaratan data dukung pada Manual IKU serta adanya kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 mengharuskan adanya transisi administrasi yang menyeluruh, termasuk validasi ulang kode registrasi dan profil kelompok sesuai pedoman terbaru. Meskipun menghadapi penyesuaian regulasi yang ketat sejak tahun 2022 melalui peningkatan standar validasi dokumen (seperti SK penumbuhan dan piagam peningkatan kelas), lonjakan performa di awal tahun 2026 membuktikan bahwa langkah-langkah adaptasi yang dilakukan telah berjalan efektif. Capaian ini merefleksikan komitmen berkelanjutan BPPP Bitung dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku utama dan pelaku pendukung di wilayah binaan melalui penyelenggaraan penyuluhan yang lebih berkualitas dan terstandar. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan penyuluhan tetap berjalan secara efektif, meskipun diperlukan peningkatan intensitas koordinasi agar target tahunan dapat tercapai secara lebih optimal di tengah penyesuaian regulasi.

Tabel 16. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung per bidang dan Gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (orang)	Perempuan (orang)
1	Budidaya	17	543	50
2	Pengolahan / Pemasaran	2	6	15
3	Penangkapan	41	560	61
	Jumlah	60	1.009	126

Berdasarkan data pada tabel tersebut, kegiatan penyuluhan telah menjangkau total 60 kelompok dengan sebaran partisipan sebanyak 1.009 laki-laki dan 126 perempuan. Sektor penangkapan merupakan bidang dengan cakupan terluas yang melibatkan 41 kelompok dengan jumlah peserta laki-laki sebanyak 560 orang, serta keterlibatan perempuan sebanyak 61 orang. Sebaliknya, pada bidang pengolahan dan pemasaran yang terdiri dari 2 kelompok, partisipasi perempuan menunjukkan dominasi yang signifikan dengan jumlah 15 orang, dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 6 orang. Selanjutnya, bidang budidaya tercatat sebagai sektor terbesar kedua dengan cakupan 17 kelompok yang melibatkan 543 laki-laki dan 50 perempuan. Secara akumulatif, data ini mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan masih didominasi oleh

peserta laki-laki pada mayoritas sektor, terutama pada bidang penangkapan dan budidaya, sementara bidang pengolahan dan pemasaran tetap menjadi pusat partisipasi bagi pelaku usaha perempuan. Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam mengakses penyuluhan telah mencapai 11,1% dari total peserta (126 dari 1.135 orang), yang merefleksikan peran serta perempuan dalam penguatan kapasitas kelembagaan sektor kelautan dan perikanan di wilayah binaan. Mengingat realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 17. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capaian Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	500	661	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	1.000	1.100	110,00
4	BPPP Ambon	500	510	102,00
5	BPPP Bitung	50	60	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 17, capaian indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh di lingkup BPPSDMKP menunjukkan performa yang sangat efektif dan progresif. Keberhasilan ini tercermin dari kemampuan mayoritas satuan kerja dalam melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. BPPP Medan dan BPPP Bitung mencatatkan persentase realisasi tertinggi yang menyentuh angka 120,00%, dengan volume masing-masing sebanyak 661 kelompok dan 60 kelompok. Capaian positif tersebut diikuti oleh BPPP Banyuwangi dengan realisasi sebesar 110,00% (1.100 kelompok) dan BPPP Ambon sebesar 102,00% (510 kelompok). Sementara itu, BPPP Tegal tidak memiliki nilai capaian pada tabel ini dikarenakan tidak mengampu target untuk indikator penyuluhan pada periode terkait. Dengan demikian, seluruh satuan kerja di bawah naungan BPPSDMKP yang mengampu indikator ini telah berhasil melampaui ambang batas minimum 100,00%. Hasil ini merefleksikan komitmen kolektif yang kuat dalam mengoptimalkan fungsi penyuluhan guna memperkuat kapasitas kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan secara merata di berbagai wilayah kerja.

Optimalisasi kegiatan penyuluhan terus dilakukan oleh Penyuluh Perikanan baik penyuluh perikanan PNS maupun penyuluh perikanan PPPK dan PPPK Paruh Waktu di bawah naungan BPPP Bitung melalui pendampingan intensif bagi pelaku utama dan pelaku usaha. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Faktor utama dalam keberhasilan ini adalah

kompetensi teknis dan manajerial yang mumpuni dari para tenaga penyuluh, didukung oleh latar belakang pendidikan yang relevan dan pengalaman lapangan yang luas. Selain itu, strategi penempatan penyuluh yang presisi di wilayah binaan masing-masing turut berkontribusi signifikan terhadap efektivitas program, termasuk dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui pemberdayaan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan motivasi yang signifikan pada pelaku utama dan pelaku usaha dalam membentuk kelembagaan kelompok. Perubahan pola pikir ke arah kemandirian usaha tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah mencerminkan keberhasilan transformasi progresif sesuai tujuan penyuluhan. Guna mempertahankan dan meningkatkan performa tersebut, BPPP Bitung melaksanakan berbagai langkah strategis, antara lain penyelenggaraan rapat koordinasi rutin secara luring maupun daring sebagai forum evaluasi dan sinkronisasi data capaian IKU. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM penyuluh dan penataan sebaran wilayah binaan berbasis potensi daerah terus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui pendekatan pendampingan yang intensif ini, diharapkan kelompok sasaran mampu meningkatkan daya saing dan pendapatan mereka, sehingga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi masyarakat di wilayah binaan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu pendampingan dan pembinaan kelompok berjumlah 60 kelompok.

IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)

Indikator Kinerja Utama (IKU) mengenai Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk merupakan parameter kinerja yang merefleksikan jumlah kelompok pelaku utama maupun pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang diinisiasi oleh Penyuluh Perikanan pada Satminkal BPPP Bitung. Proses penumbuhan kelompok tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam pelaksanaannya, tenaga penyuluh melibatkan unsur pemerintah daerah serta berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perikanan setempat guna menjamin legalitas dan keselarasan program di tingkat wilayah. Adapun rincian capaian IKU terkait pembentukan kelompok pada Satminkal BPPP Bitung tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 18. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKSK.03.03 Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)									
Realisasi Capaian Triwulan I				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022 - 2025				Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
2022	2023	2024	2025	1,00	2,00	120,00	-33,33	369,00	0,54
12,00	6,00	15,00	3,00						

Berdasarkan data pada tabel 18, dinamika pembentukan kelompok pelaku usaha oleh BPPP Bitung selama periode 2022 hingga 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif, dengan pencapaian tertinggi pada periode historis tersebut tercatat sebanyak 15,00 kelompok pada tahun 2024. Memasuki tahun berjalan 2026, kinerja penumbuhan kelompok baru menunjukkan langkah awal yang positif, di mana pada Triwulan I 2026, BPPP Bitung berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,00 kelompok dengan realisasi mencapai 2,00 kelompok. Capaian tersebut setara dengan tingkat efektivitas sebesar 120,00%. Namun, jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan I tahun 2025 yang mencapai 3,00 kelompok, terdapat penurunan sebesar 33,33%. Penurunan ini merupakan bagian dari penyesuaian strategi penumbuhan kelompok yang kini lebih mengedepankan kualitas dan validasi profil sesuai dengan regulasi terbaru. Berdasarkan realisasi pada Triwulan I 2026 tersebut, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029 yang ditetapkan sebesar 369,00 kelompok, maka capaian terhadap target jangka panjang telah menyentuh angka 0,54%. Capaian awal tahun ini menegaskan konsistensi BPPP Bitung dalam mengakselerasi penumbuhan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan secara bertahap, guna memastikan keberlanjutan pendampingan sesuai dengan peta jalan organisasi yang telah ditetapkan.

Tabel 19. Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung per bidang dan gender

No	Bidang	Jumlah (kelompok)	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1	Budidaya	1	9	1
2	Penangkapan	1	10	0

Berdasarkan data pada Tabel 19, kegiatan pembentukan kelompok pelaku usaha oleh BPPP Bitung telah mencakup dua sektor utama dengan total 2 kelompok yang melibatkan 20 partisipan, terdiri dari 19 laki-laki dan 1 perempuan. Sektor penangkapan merupakan salah satu bidang utama yang melibatkan 1 kelompok dengan total 10 anggota yang seluruhnya didominasi oleh laki-laki (10 orang), tanpa

keterlibatan anggota perempuan pada kelompok tersebut. Sementara itu, bidang budidaya juga mencatatkan pembentukan 1 kelompok dengan total 10 anggota, yang terdiri dari 9 laki-laki dan 1 orang perempuan. Secara akumulatif, data ini mengindikasikan bahwa pada tahap pembentukan kelompok di periode ini, partisipasi masih didominasi secara signifikan oleh laki-laki. Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam pembentukan kelompok baru ini tercatat sebesar 5%, yang menunjukkan perlunya akselerasi berkelanjutan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam mengakses inisiasi kelembagaan di sektor kelautan dan perikanan. Mengingat realisasi kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional karena keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (kelompok)	Realisasi Capain Satker (kelompok)	Persentase Realisasi Capaian Satker (%)
1	BPPP Medan	20	24	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	25	35	120,00
4	BPPP Ambon	20	24	120,00
5	BPPP Bitung	1	2	120,00

Berdasarkan data pada Tabel 20, capaian indikator Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk di lingkup BPPSDMKP secara konsisten menunjukkan performa yang sangat optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Seluruh satuan kerja yang mengampu indikator ini berhasil mencapai tingkat efektivitas maksimal sebesar 120,00%. Secara spesifik, BPPP Banyuwangi mencatatkan volume pembentukan tertinggi sebanyak 35 kelompok dari target 25 kelompok. Capaian positif ini diikuti oleh BPPP Medan dan BPPP Ambon yang masing-masing berhasil membentuk 24 kelompok dari target 20 kelompok. Sementara itu, BPPP Bitung juga menunjukkan efektivitas serupa dengan merealisasikan pembentukan 2 kelompok dari target 1 kelompok. Adapun BPPP Tegal tidak memiliki nilai capaian dikarenakan satuan kerja tersebut tidak mengampu indikator kinerja terkait pada periode ini. Secara akumulatif, seluruh satuan kerja di bawah naungan BPPSDMKP yang dibebani target telah berhasil memenuhi bahkan melampaui sasaran kinerja yang telah ditetapkan dengan persentase capaian yang seragam di angka 120,00%, yang merefleksikan komitmen kuat dalam mengakselerasi penumbuhan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Keberhasilan pencapaian IKU ini didorong oleh sinergi sumber daya manusia yang melibatkan aparat desa, pelaku utama, serta masyarakat luas, di bawah supervisi intensif dari Penyuluh Perikanan baik penyuluh perikanan PNS maupun penyuluh perikanan PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Tingginya antusiasme masyarakat dalam membentuk kelembagaan mencerminkan peningkatan pemahaman publik terhadap manfaat kolektivitas dalam usaha perikanan. Selain itu, keterlibatan aktif penyuluh melalui sosialisasi lapangan dan pendampingan teknis menjadi faktor utama dalam memastikan kelompok yang terbentuk memiliki basis organisasi yang kuat dan terorganisir. Forum koordinasi rutin setiap minggu juga berfungsi efektif sebagai instrumen monitoring pemenuhan data dukung serta wadah mitigasi terhadap berbagai kendala operasional di lapangan.

Guna menjamin keberlanjutan dan efektivitas kinerja pada tahun 2026, BPPP Bitung menerapkan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan intensitas pendampingan bagi kelompok baru agar mampu mencapai kemandirian usaha lebih cepat. Optimalisasi koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan untuk mempercepat proses legalisasi dan pengesahan kelompok sesuai regulasi yang berlaku. Melalui pengawasan dan evaluasi berkala, diharapkan setiap kelompok yang dibentuk tidak hanya memenuhi kriteria administratif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota serta pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Pembentukan kelompok perikanan dan Pembinaan kelembagaan berjumlah 2 kelompok.

IKSK.03.04. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)

Indikator ini merefleksikan jumlah Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit) melalui Penyuluh Kelautan dan Perikanan. Standar pendampingan tersebut dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan relevan lainnya. Melalui indikator ini, efektivitas penguatan kelembagaan ekonomi di tingkat pelaku usaha dapat diukur guna memastikan terciptanya struktur organisasi yang lebih formal, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 21. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan									
IKSK.03.04. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi yang Mendapatkan Pendampingan di BPPP Bitung (unit)									
Realisasi Capaian Triwulan I 2022 - 2025				2026				Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW I 2026	Realisasi TW I 2026	% Capaian	% Kenaikan 2025 - 2026	Target 2029	% Capaian Thd Target 2029
-	-	-	1,00	1,00	1,00	100,00	-	198,00	0,51

Berdasarkan data pada tabel 21, terlihat bahwa kinerja pendampingan pada tahun anggaran berjalan menunjukkan konsistensi yang stabil. BPPP Bitung menetapkan target sebesar 1,00 unit untuk Triwulan I tahun 2026 dan telah berhasil merealisasikan pendampingan sebanyak 1,00 unit, sehingga menghasilkan tingkat efektivitas tepat sasaran sebesar 100,00%. Mengingat indikator ini baru mulai realisasinya sejak tahun 2025, perbandingan dengan data historis untuk periode 2022 hingga 2024 belum tersedia. Namun, pencapaian pada Triwulan I 2026 ini menunjukkan performa yang identik dengan realisasi Triwulan I pada tahun 2025 sebelumnya, yang mengindikasikan terjaganya ritme kerja instansi dalam melakukan pendampingan kelembagaan ekonomi. Selanjutnya, gabungan kelompok dan/atau koperasi yang mendapatkan pendampingan di BPPP Bitung terbagi atas Gapokan sebanyak 6 unit dan Koperasi sebanyak 22 unit.

Berdasarkan capaian pada Triwulan I 2026 tersebut, jika dibandingkan dengan target tahun 2029 pada Rencana Kegiatan BPPP Bitung 2025-2029 yang sebesar 198,00 unit, maka progres capaian terhadap target jangka panjang telah mencapai 0,51%. Keberhasilan ini menegaskan komitmen BPPP Bitung dalam mengawal penguatan kapasitas gabungan kelompok maupun koperasi perikanan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan target strategis organisasi. Hal ini menjadi fondasi penting dalam mendorong transformasi kelembagaan menuju kemandirian ekonomi yang lebih mapan. Dikarenakan realisasi kinerja IKU ini belum dapat diperbandingkan dengan standar nasional akibat keterbatasan institusi pembanding yang setara, maka evaluasi dilakukan melalui studi komparasi dengan unit kerja di lingkup BPPSDMKP sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 22. Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit) dengan BPPP Lingkup BPPSDMKP

No	Nama Satker	Target Capaian Satker (unit)	Realisasi Capain Satker (unit)	% Persentase Realisasi Capaian Satker
1	BPPP Medan	4	10	120,00
2	BPPP Tegal	-	-	-
3	BPPP Banyuwangi	15	17	113,00
4	BPPP Ambon	5	6	120,00
5	BPPP Bitung	1	1	100,00

Berdasarkan data pada tabel 22, seluruh satuan kerja lingkup BPPSDMKP yang mengampu indikator ini menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian yang umumnya telah memenuhi hingga melampaui target yang ditetapkan. BPPP Medan dan BPPP Ambon mencatatkan persentase realisasi tertinggi sebesar 120,00%, masing-masing dengan realisasi sebanyak 10 unit dari target 4 unit dan 6 unit dari target 5 unit. Capaian positif ini juga ditunjukkan oleh BPPP Banyuwangi yang berhasil mencapai persentase realisasi sebesar 113,00% melalui realisasi 17 unit dari target 15 unit. Selanjutnya, BPPP Bitung menunjukkan kinerja yang akuntabel dengan capaian sebesar 100,00%, di mana realisasi 1 unit telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Sementara itu, BPPP Tegal tidak mencatatkan capaian pada indikator ini karena tidak mengampu kegiatan atau target pada periode pelaporan tersebut. Secara umum, keberhasilan sebagian besar satuan kerja dalam mencapai bahkan melampaui target mencerminkan efektivitas pelaksanaan program yang baik serta komitmen dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara optimal.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU ini di BPPP Bitung meliputi komitmen dan sinergi kolektif antara tenaga penyuluh perikanan, fasilitator lapangan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sektor perikanan. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh pemetaan kebutuhan pendampingan yang presisi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, serta koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Selain itu, dukungan kebijakan internal, sistem pelaporan yang terstruktur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala turut memperkuat pencapaian indikator ini.

Langkah-langkah strategis yang telah diimplementasikan mencakup identifikasi dan pemetaan kelompok sasaran yang sistematis, penyusunan rencana kerja pendampingan yang terukur, serta pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi teknis. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan dan pembinaan manajemen usaha juga menjadi fokus utama, di samping pelaporan hasil pendampingan secara periodik sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, BPPP Bitung berkomitmen untuk terus mendorong transformasi gabungan kelompok dan koperasi menuju tata kelola organisasi yang mandiri, profesional, dan berdaya saing. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator kinerja ini yaitu Pembentukan dan Pembinaan Kelembagaan Gapokan berjumlah 1 kelompok.

IKSK.03.05 Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket)

IKU Media penyuluhan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di BPPP Bitung (Paket) tidak terdapat target pada Triwulan I.

IKSK.03.06 Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)

IKU Jumlah Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I.

3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2026

3.3.1. Realisasi Anggaran

Berdasarkan data laporan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) per 31 Maret 2026, BPPP Bitung mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang sangat optimal. Realisasi belanja hingga triwulan I tahun 2026 sebesar Rp13.663.907.978,- atau mencapai 20,46% dari total alokasi pagu efektif sebesar Rp68.652.058.000,-. Tingginya persentase penyerapan ini mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mengimplementasikan rencana kerja secara akuntabel dan tepat waktu. Rincian lebih lanjut mengenai distribusi realisasi anggaran tersebut pada masing-masing komponen kegiatan dapat dicermati pada tabel di bawah ini:

Tabel 23. Realisasi Anggaran Per 31 Maret 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total (%)
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	348.472.000	0,00	0,00
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	348.472.000	0,00	0,00
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	965.840.000	0,00	0,00
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)	348.472.000	0,00	0,00
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)	348.472.000	0,00	0,00
		6	Nilai PNBSP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	161.280.000	41.613.750	25,80
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	8.117.725.000	0,00	0,00
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen)	348.472.000	0,00	0,00
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan	1.077.484.125	254.863.513	12,5

			pada SIRUP BPPP Bitung (%)			
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	1.077.484.125	254.863.513	12,5
3	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		18	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		19	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		20	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		21	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		22	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	8.174.163.000	1.930.564.354	16,67
		TOTAL		68.652.058.000	13.663.907.978	20,46

Sumber : Saktiweb

Berdasarkan data pada tabel 23, secara kumulatif kinerja keuangan hingga periode pelaporan menunjukkan capaian sebesar Rp13.663.907.978,- atau 20,46% dari total pagu anggaran Rp68.652.058.000,-. Capaian ini mencerminkan bahwa penyerapan anggaran masih dalam tahap awal pelaksanaan kegiatan. Jika ditinjau berdasarkan sasaran kegiatan, realisasi anggaran terbesar berasal dari sasaran Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan nilai serapan sebesar Rp1.930.564.354,- atau 16,67% pada masing-masing indikatornya. Sementara itu, pada sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, realisasi anggaran mencapai Rp254.863.513,- atau sebesar 12,5%. Di sisi lain, sasaran Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan secara umum belum menunjukkan realisasi anggaran yang signifikan hanya indikator Nilai PNBPN Satker BPPP Bitung yang mencatat realisasi sebesar Rp41.613.750,- atau 25,80%. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan masih memerlukan percepatan, khususnya pada komponen pelatihan yang menjadi salah satu sasaran utama. Optimalisasi penyerapan anggaran pada periode berikutnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3.3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya di BPPP Bitung

Implementasi pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran di lingkungan BPPP Bitung dilakukan secara konsisten dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sesuai dengan mandat Pasal 7 ayat (2) pada peraturan tersebut, penilaian kinerja anggaran difokuskan pada empat variabel utama, yaitu capaian keluaran (output), tingkat

penyerapan anggaran, aspek efisiensi, serta konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Dalam operasionalisasinya, pengukuran nilai kinerja anggaran tersebut dilakukan melalui aplikasi SMART DJA sebagai perangkat resmi yang terintegrasi. Dalam konteks manajemen internal, efisiensi sumber daya pada BPPP Bitung diukur melalui analisis selisih antara persentase capaian kinerja indikator dengan persentase realisasi anggaran yang digunakan. Rasio ini memberikan gambaran objektif mengenai optimalisasi sumber daya dalam menghasilkan keluaran yang telah ditargetkan. Perbandingan komprehensif antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran tersebut tersaji secara terperinci dalam tabel di bawah ini:

Tabel 24. Efisiensi Anggaran Per 31 Maret 2026

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Capaian Kinerja (%)	Pagu Total	Realisasi	Persentase Realisasi Pagu Total (%)	Persentase Efisiensi (%)
Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	120,00	10.987.205.000	41.613.750	0,38	119,62
	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)					
	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)					
	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)					
	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)					
	Nilai PNBP Sarker BPPP Bitung (rupiah miliar)					
	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)					
	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen)					
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	118,52	8.619.873.000	2.038.908.104	23,65	94,87
	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)					
	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)					
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%)					
	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)					
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)					
	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)					
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)					
Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (kelompok)	116,00	49.044.978.000	11.583.386.124	23,62	92,38
	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh BPPP Bitung (kelompok)					
	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)					
	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)					
	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket)					
	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)					
	TOTAL	118,08	68.652.058.000	13.663.907.978	15,88	102,20

Sumber : Aplikasi Kinerja KKP dan Saktiweb

Berdasarkan Tabel 24, BPPP Bitung menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian kinerja kumulatif sebesar 118,08%, yang mengindikasikan bahwa seluruh sasaran strategis telah melampaui target yang ditetapkan. Dari sisi keuangan, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp13.663.907.978,- atau 15,88% dari total pagu Rp68.652.058.000,-, dengan tingkat efisiensi sebesar 102,20%. Dalam konteks ini, semakin kecil nilai efisiensi menunjukkan penggunaan anggaran yang semakin optimal, sehingga nilai efisiensi yang masih tinggi mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya efisien. Secara rinci, sasaran Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan menunjukkan tingkat efisiensi terbaik dengan nilai 92,38% dan capaian kinerja sebesar 116,00%, serta realisasi anggaran Rp11.583.386.124,- atau 23,62%. Hal ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran pada kegiatan penyuluhan relatif paling optimal dalam menghasilkan output yang melampaui target. Selanjutnya, sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP mencatat capaian kinerja sebesar 118,52% dengan efisiensi 94,87% dan realisasi anggaran Rp2.038.908.104,- atau 23,65%, yang menunjukkan pengelolaan anggaran yang cukup efisien meskipun masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, sasaran Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan memiliki capaian kinerja tertinggi sebesar 120,00%, namun tingkat efisiensinya mencapai 119,62% dengan realisasi anggaran yang masih sangat rendah yaitu Rp41.613.750,- atau 0,38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target kinerja terlampaui, efisiensi anggaran belum optimal karena penggunaan anggaran belum sebanding dengan capaian output. Perlu dipahami bahwa capaian ini masih berada pada Triwulan I, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan masih cukup panjang hingga Triwulan IV. Dengan demikian, realisasi anggaran dan tingkat efisiensi masih sangat mungkin mengalami perubahan dan perbaikan seiring dengan percepatan pelaksanaan program di triwulan berikutnya. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang sudah melampaui target menjadi modal yang sangat baik, dan ke depan perlu diimbangi dengan optimalisasi penyerapan anggaran agar penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Pencapaian efisiensi anggaran di BPPP Bitung dilakukan melalui empat alur tahapan strategis yang terintegrasi untuk memastikan penggunaan sumber daya dilakukan secara optimal dan akuntabel. Tahapan tersebut meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan strategis dilakukan dengan menitikberatkan pada pencapaian outcome melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan penentuan skala prioritas kegiatan. Pengawasan pelaksanaan program dilakukan secara intensif melalui monitoring berkala, termasuk laporan mingguan dan evaluasi bulanan, guna memastikan keselarasan antara rencana dan realisasi.

2. Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan secara efektif melalui koordinasi yang solid, serta pemanfaatan metode daring dan blended dalam pelaksanaan program. Seluruh kegiatan mengacu pada Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dengan fokus pada pencapaian output prioritas, khususnya pada bidang penyuluhan dan pelatihan.

3. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel melalui sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi berbasis digital (myasnbkn, Kinerjaku KKP, Emonev Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, serta Weekly Report internal). Pemanfaatan berbagai aplikasi sistem monitoring kinerja dan keuangan memungkinkan penyediaan data secara cepat dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

4. Penyesuaian

Sebagai bagian dari pengendalian, dilakukan penyesuaian dan reviu terhadap program dan anggaran berdasarkan hasil evaluasi. Langkah ini mencakup revisi indikator, target, serta alokasi anggaran secara selektif dan terukur guna menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Capaian Kinerja Utama

Pengukuran capaian kinerja BPPP Bitung pada tahun anggaran 2026 dilaksanakan melalui analisis komparatif antara target yang telah direncanakan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif organisasi. Seluruh proses pencatatan, pemantauan, dan pengukuran data kinerja diintegrasikan melalui platform digital resmi yaitu <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang komprehensif tersebut, BPPP Bitung berhasil mencatatkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan I tahun 2026 sebesar 118,08% (Istimewa). Pencapaian ini mengindikasikan bahwa secara kolektif, sasaran strategis balai telah terealisasi melampaui target ambang batas yang ditetapkan, yang mencerminkan efektivitas dan produktivitas tinggi dalam pelaksanaan program kerja sepanjang tahun.



Gambar 4. Nilai Kinerja Organisasi BPPP Bitung

Sumber : web.kinerjaku.kkp.go.id

Capaian kinerja yang dicapai yaitu pada 3 Sasaran Strategis dan 8 indikator kinerja utama sebagai berikut :

1. Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
- Nilai PNPB Satker BPPP Bitung (rupiah miliar) sebesar 0,24 rupiah miliar dari target yaitu sebesar 0,06 rupiah miliar dengan persentase 120%;
- Sarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;

- Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
2. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan:
- Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%) tercapai 29,63% dari target yaitu 25% atau dengan persentase capaian 118,52%;
 - Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%) yaitu 100% dari target 86% atau dengan persentase capaian 116,28%;
 - Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%) yaitu 77% dari target 100% atau dengan persentase capaian 120%;
 - Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Jumlah usulan inovasi satker BPPP Bitung (Inovasi) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Nilai Keterbukaan Informasi Pelayanan Publik BPPP Bitung (Nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
3. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan :
- Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok) sebanyak 2 kelompok dari target 1 kelompok atau dengan persentase 120%;
 - Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 60 kelompok dari target yaitu 50 kelompok atau dengan persentase 120%;
 - Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok) sebanyak 2 kelompok dari target sebesar 1 kelompok atau dengan persentase 120%.
 - Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit) sebanyak 1 kelompok dari target sebesar 1 kelompok atau dengan persentase 100%;
 - Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;
 - Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang) tidak terdapat target pada Triwulan I Tahun 2026;

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, capaian kinerja BPPP Bitung pada triwulan I tahun 2026 telah menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan perolehan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 118,08% (Istimewa). Pencapaian yang melampaui target ambang batas ini merefleksikan efektivitas manajerial serta komitmen seluruh jajaran dalam merealisasikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Kendati demikian, hasil ini menjadi tantangan sekaligus landasan pacu bagi organisasi untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Diharapkan pada triwulan mendatang, tren positif ini dapat dipertahankan atau ditingkatkan secara progresif, guna mewujudkan performa organisasi yang lebih unggul.

LAMPIRAN - LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdrm@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Selanjutnya
disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Kedua
Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

NO	SASARAN KEGIATAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Pelatihan Kelautan dan Perikanan	1	Lulusan Pelatihan KP Kompeten BPPP Bitung yang Terserap di Dunia Usaha, Dunia Industri dan/atau Dunia Kerja (DUDIKA) (orang)	608
		2	Persentase Peserta Pelatihan Masyarakat KP BPPP Bitung yang Menerapkan Kompetensi Hasil Pelatihan (%)	75
		3	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Bitung (orang)	800
		4	Naskah Perangkat Pelatihan Kelautan dan Perikanan BPPP Bitung (dokumen)	1
		5	Proposal Inovasi Pelatihan Berbasis Kaji Terap Bidang Kelautan dan Perikanan di BPPP Bitung (proposal)	1
		6	Nilai PNBP Satker BPPP Bitung (rupiah miliar)	0,13
		7	Sarana Prasarana Pelatihan KP yang ditingkatkan kapasitasnya di BPPP Bitung (unit)	1
		8	Penyiapan Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Tenaga Pelatih di BPPP Bitung (Dokumen)	1
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	9	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Bitung (%)	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Bitung (indeks)	83
		11	Penilaian Mandiri SAKIP BPPP Bitung (nilai)	81
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPPP Bitung (%)	86
		13	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP BPPP Bitung (%)	77
		14	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPPP Bitung (Nilai)	71
		15	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	92
		16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPPP Bitung (nilai)	71,5

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	9.842.525.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.796.194.000
Total Anggaran BPPP BITUNG		18.638.719.000

Jakarta, 6 Januari 2026

Pihak Pertama
Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Kedua
Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN BANYUWANGI MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id SUREL brsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Natalia**

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Yayan Hikmayani**

Jabatan : Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Ditingkatkan Kelasnya oleh BPPP Bitung (Kelompok)	108
		2	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Disuluh oleh BPPP Bitung (kelompok)	3.940
		3	Kelompok Pelaku Usaha dan/atau Pelaku Pendukung yang Dibentuk oleh BPPP Bitung (kelompok)	335
		4	Gabungan Kelompok dan/atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Mendapatkan Pendampingan oleh BPPP Bitung (unit)	33
		5	Media Penyuluhan Terstandar yang Disusun di BPPP Bitung (Paket)	1
		6	Penyuluh Perikanan yang Lulus Penilaian Kompetensi di BPPP Bitung (orang)	2

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	2.297.100.000
2	Dukungan Manajemen Internal	47.554.959.000
Total Anggaran BPPP Bitung		49.852.059.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yayan Hikmayani

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Bitung



Ditandatangani
Secara Elektronik

Natalia



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

JALAN TANDURUSA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA BITUNG
KOTAK POS 18 /Bt BITUNG 95526
TELEPON (0438) 21650, 21681 (LACAK), FAKSIMILE (0438) 31477
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sekretariat@bpppbitung.com

KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG
NOMOR 1/BPPP.BTG/OT.210/KPTS/II/2026

T E N T A N G
SUSUNAN PERSONALIA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2026 dipandang perlu mengubah Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung Nomor : 02/BPPP.BTG/OT.210/KPTS/II/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang susunan personalia pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung tentang susunan personalia Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS;
3. Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/18/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan KKP;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06 tahun 2013 tentang Presensi Elektronik di Lingkungan KKP;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 56/KEPMEN-KP/2013, tentang Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil Lingkup KKP;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.28-6/99 tanggal 11 Maret 2014, tentang Penjelasan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih bersedia/tidak bersedia lagi melaksanakan tugas;

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penambahan Tunjangan Kinerja Pegawai KKP;
13. Peraturan Kepala BKN Nomor. 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai;
14. Perpers No. 131 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 80/PMK.05/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 58/PERMEN-KP/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
19. Peraturan BKN Nomor 24 tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 15 tahun 2000 tentang Pedoman Umum Kepegawaian dilingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
22. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 25/KEPMEN-KP/KP.430/VI/2023 Tanggal 21 Juni 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
23. PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor. KEP.21/MEN-KP/KU.611/2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Daerah (Unit Pelaksana Teknis) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.01/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/I/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.33/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/VI/2024 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
26. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.35/BPPP.BTG/KPTS/KU.611/VII/2023 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.04/BRSDM-BPPP.BTG/KPTS/KU.611/I/2020 tentang pengangkatan Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung;
27. PERMEN KP Nomor. 10 tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan KKP;
28. Permen KP nomor. 14 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
30. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA-032.12.2.239260/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG NOMOR 02/BPPP.BTG/OT.210/KPTS/I/2026 TENTANG SUSUNAN PERSONALIA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG.
- Pertama : Menetapkan nama-nama untuk diangkat pada jabatan sesuai dengan lampiran I s.d V Keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan kepada Pegawai yang alih tugas untuk segera melaksanakan serah terima dan tanggung jawab dalam waktu sesingkat mungkin.
- Ketiga : Setiap Kasubbag dan Ketua Tim Kerja di lingkungan BPPP Bitung bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- Keempat : Tenaga Fungsional Widyaiswara dan Instruktur yang diberikan tugas tambahan agar berkoordinasi dengan Ketua Tim Kerja secara berkala dan memberikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Kepala BPPP Bitung Nomor : 02/BPPP.BTG/OT.210/KPTS/I/2025 tanggal 02 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 2 Januari 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN
PERIKANAN BITUNG,



NATALIA, S.St.Pi, M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001

Tembusan :

1. Kepala BPPSDM;
2. Plt. Sekretaris BPPSDM;
3. Kepala Pusat Pelatihan KP.

Lampiran I Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
Nomor : 1/BPPPP.BTG/OT.210/KPTS/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Keterangan	Ruangan
1	2	3	4	5	6
1	Natalia, S.ST.Pi, M.Pi 19801225 200502 2 001 Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Balai	S2	Kuasa Pengguna Anggaran	Ruang Kepala Balai

Kuasa Pengguna Anggaran,

Natalia, S.ST.Pi, M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001

II. Tim Kerja Dukungan Manajemen

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Penugasan Langsung Kepala Balai	Ruangan
1	2	3	4	5	6
1	Sri Widiyanti, S.Pi 19811005 200502 2 001 Penata Tk. I, III/d	Kepala Subbagian Umum/ Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	S1	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Tim Kode Etik Penanggung Jawab SFV Eduwisata Ketua Tim UPMI, Tim SPIP Tim Kepelautan PJ Area 3 WBK, Anggota Area 5 WBK	Ruang Tata Usaha
2	Ir. Ronal Malingkas, MP 19680502 199403 1 005 Pembina Utama Muda, IV/c	Widyaiswara Ahli Madya	S2	Ketua LSP Tim UPMI Anggota Area 1 WBK	Ruang Kantor WS Budidaya
3	Serfi Ganap, SE 19690924 199304 1 001 Penata Tk.I, III/d	Analisis Metode Penyuluhan	S1	Pengadministrasi Penyuluhan	Ruang Tata Usaha
4	Jean L.H. Rotinsulu, S.Sos 19690912 199303 2 002 Penata Tk.I, III/d	Pranata Keuangan APBN Penyelia (Bendahara Penerimaan)	S1	PPBAP Anggota Area 4 WBK	Ruang Keuangan
5	Agus Tahir, A.Pi, M.Si 19720817 200312 1 005 Penata Tk.I, III/d	Instruktur Ahli Muda	S2	Tim Pengembangan SFV Eduwisata	WS Penangkapan
6	Kamang C. Malingkas, SE, AK 19740320 200901 1 002 Penata Tk.I, III/d	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda (Penyusun Laporan Keuangan dan BMN)	S1	Petugas Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Petugas Laporan Pajak, Petugas PIPK, Tim SPIP Operator SAKTI (Modul Pelaporan)	Ruang Keuangan
7	Anjas AS Komboe, A.Md 19820523 200801 1 008 Penata, III/c	Mualim	D3	Penanggung Jawab Ruang PTSP Tim Kepelautan	Ruang PTSP
8	Nofal Bachmid, SE 19760124 200212 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1	Operator SIASN Tim Kode Etik Anggota Area 3 WBK	Ruang Tata Usaha
9	Alfin Rumimpunu 19720827 200212 2 003 Penata Muda Tk.I, III/b	Pengadministrasi Umum	SMEA	Urusan Rumah Tangga, PJ Asrama dan kebersihannya	Ruang Tata Usaha
10	Nurdin Ismail, S.Sos 19741128 200312 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Pengelola Kepegawaian	S1	Pengelola Persuratan Anggota Area 3 WBK	Ruang Tata Usaha
11	Jovly Ole, S.Sos 19761202 200502 1 001 Penata Muda Tk.I, III/b	Nakhoda Kapal Latih KM. Bobara	S1	Pengadministrasi Pelatihan, Tim PPK Tim Kepelautan	Ruang Pelatihan
12	Joice Ch. Pandey, S.Sos 19770604 200604 2 011 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis SDM Aparatur Operator SIASN, Operator e-SKP	S1	Operator SIASN, Operator e-SKP Pengelola Surat Operator Aplikasi e-Layar/e-Cofis, Tim Kode Etik, Anggota Area 3 WBK	Ruang Tata Usaha
13	Aris Suryanto, A.Md 19841011 200801 1 003 Penata, III/c	Analisis SDM Aparatur Operator e-SKP	D3	Pengelola Surat, Pengadministrasi BMN, Operator SAKTI (Modul Asset, Persediaan, Komitmen)	Ruang Tata Usaha
14	Odorita Naibaho, A.Md 19830614 201012 2 001 Penata Muda, III/a	Pranata Keuangan APBN Mahir, Bendahara Pengeluaran, Operator Aplikasi SAKTI	D3	Operator SAKTI (Modul Pembayaran dan Komitmen), Petugas Pemesan Tiket KKP Anggota Area 4 WBK	Ruang Keuangan
15	Lendy Akay 19780110 200502 1 001 Penata Muda, III/a	Juru Mudi	STM	Teknisi Listrik dan Jaringan, Pengelola WS Penangkapan Petugas Kebersihan Kelas Penangkapan	WS Permesinan
16	Sahran 19760327 200701 1 002 Penata Muda, III/a	Oiler	SMA	Teknisi Sarana dan Prasarana, Pengelola WS Permesinan, Penjaga Wisma Tamu Petugas Kebersihan WS Permesinan	WS Permesinan
17	A. Samad Samanery 19870227 200801 1 001 Penata Muda, III/a	Kepala Kamar Mesin	SUPM	Pengadministrasi Barang Milik Negara, Pengelola WS Permesinan, Operator LPSE/Tim PPK Tim Kepelautan Operator SAKTI (Modul Asset, Persediaan, Komitmen)	Ruang Pelatihan
18	Charles Malalangi 19781222 200901 1 001 Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Umum	SMA	Petugas Kebersihan Tata Usaha, Pengemudi	Ruang Tata Usaha

19	Adi Satria Ramadhan, A.Md.Ak 20000107 202201 1 003 Pengatur, II/c	Verifikator Keuangan	D3	Operator Aplikasi SAKTI (Modul Pembayaran), Petugas Laporan Pajak Sekretaris WBK	Ruang Keuangan
20	Yosua Kakase, A.Md 20001027 202506 1 004 Pengatur, II/c	Pranata SDM Aparatur Terampil	D3	Operator e-presensi, Operator SIASN	Ruang Tata Usaha
21	Dinda Ayu Khairunnisa, A.Md.Kep 19970219 202421 2 004 VII	Perawat Terampil PPPK	D3	Tim Kepelautan, Operator e-Lapor Anggota Area 2 WBK	Ruang PTSP
22	Ayu Setiarni, SE 19980708 202521 2 036 IX	Penata Layanan Operasional PPPK		Pengelola Surat	ST BPPP Ambon
23	Marwanto Dilapanga 19820326 202521 1 043	Operator Layanan Operasional PPPK Paruh Waktu	SUPM	Petugas Kebersihan Eduwisata Bahari dan WS Penangkapan	WS Penangkapan
24	Artje Tanauma 19800429 202521 1 027	Operator Layanan Operasional PPPK Paruh Waktu	SMA	Petugas Kebersihan Ruang Perpustakaan, Ruang PTSP dan Ruang Kelas Budidaya	Ruang PTSP
25	Jefta Wahyudi Rinan 19830126 202521 1 047	Operator Layanan Operasional PPPK Paruh Waktu	SMA	Petugas Kebersihan Aula dan Ruang Rapat	Ruang Tata Usaha
26	Febriana Walangare, S.Pi	Petugas Layanan Informasi (PJLP)	S1	Sekretaris Kepala Balai Anggota Area 6 WBK Petugas Kebersihan Lobby	Ruang Lobby Utama
27	Rahman Fawaid, A.Md	Petugas Tambak/Kolam (PJLP)	D3	Petugas Kebersihan WS Budidaya	WS Budidaya
28	Arsita Amelia Darise	Petugas Kebersihan (PJLP)	SMA	Petugas Asrama	Asrama
29	Maldini Fernando Kudato	Petugas Kebersihan (PJLP)	SMA	Petugas Pemotong Rumput dan Kebersihan Lingkungan Kantor	WS Permesinan
30	Suyadi	Petugas Kebersihan (PJLP)	SMA	Penata Taman dan Petugas Kebersihan Lingkungan Kantor	WS Permesinan
31	Mastura Abdullah	Petugas Kebersihan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan WS PHP dan Asrama	WS PHP
32	Fajar Febriyanto	Petugas Kebersihan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Selasar Kantor Utama Operator SIPPN, Anggota Area 6 WBK	Ruang Lobby Utama
33	Jusuf Arkani	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam
34	Maxi Makasekehe	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam
35	Irfan Mahmud	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam
36	Roly Polii	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam
37	Gevi P. Pangala	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam
38	Andreansyah Yusuf	Petugas Keamanan (PJLP)	SMA	Petugas Kebersihan Pos Satpam dan sekitarnya	Pos Satpam

Kepala Pengguna Anggaran,

Natalia, S.ST.Pi, M.Pi
 NIP. 19801225 200502 2 001

III. Tim Kerja Prasarana dan Sarana, serta Pengelolaan PNB

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Penugasan Langsung Kepala Balai	Ruangan
1	2	3	4	5	6
1.	Merlyn Diana Manurung, S.St.Pi., M.Si 19870505 201001 2 002 Penata Tk.I, III/d	Ketua Tim Kerja Prasarana dan Sarana, serta Pengelolaan PNB/ Perencana Ahli Muda	S2	Penanggung Jawab Program, Monev Ketua Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Tim SPIP PJ eMonev Bappenas, PJ eMonev Proyek SBSN Ketua Tim WBK, PJ Area 5 WBK Ketua Tim Kepelautan	Ruang Program
2	Kader Lentang, S.Pd,M.Si 19660118 200112 1 003 Pembina Tk.I, IV/b	Instruktur Ahli Madya	S2	Tim Pengembangan SFV Eduwisata Tim UPMI	WS Permesinan
3	Ir. Treesje Supit,M.Si 19660601 199303 2 004 Pembina Tk.I, IV/b	Widyaiswara Ahli Madya	S2	Penanggung Jawab Green House (Pupuk Organik Limbah Ikan)	WS PHP
4	Trixa P Rumajar, S.Pi, M.Si 19700303 199603 2 001 Pembina Tk.I, IV/b	Widyaiswara Ahli Madya	S2	Ketua TUK, Tim SPIP Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Operator e-Laut Anggota Area 5 WBK	WS PHP
5	Frine Femsy Tuju, S.Pi,M.Si 19770211 200212 2 003 Penata Tk.I, III/d	Widyaiswara Ahli Muda	S2	Penanggung Jawab WS PHP Tim Pengembangan SFV Eduwisata Anggota Area 5 WBK Tim UPMI	WS PHP
6	Adi Saputra, A.Md, S.Pi, 19840511 200801 1 003 Penata, III/c	Instruktur Penyelia	S2	Penanggung Jawab WS Penangkapan Tim Kepelautan Penyusun HCDP dan TNA Anggota Area 6 WBK	WS Penangkapan
7	Gani Asri Muharam, A.Md 19831024 201012 1 001 Penata, III/c	Instruktur Penyelia	S1	Penanggung Jawab WS Budidaya Tim Pengembangan SFV Eduwisata	Ruang WS Budidaya
8	Julister Sonobe, S.T 19700724 200212 1 004 Penata Muda Tk.I, III/b	Instruktur Ahli Pertama	S1	Penanggung Jawab Peralatan Kepelautan Tim Kepelautan	WS Penangkapan
9	Adi Kuswoyo, S.Pi 19811216 200701 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Instruktur Ahli Pertama	S1	Penanggung Jawab Workshop Permesinan Tim Kepelautan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja	WS Permesinan
10	Muh. Fiqi Zulendra, S.S.T.Pi, M 19920512 201503 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b	Instruktur Ahli Pertama	S2	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Operator Kinerjaku, Operator eSAKIP PJ Area 4 WBK	Ruang Program
11	Maufuri Tiara, A.Md.Ak 20000504 202201 2 001 Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi	D3	Penyusun Program dan Laporan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Operator SAKTI (Modul Anggaran), Tim SPIP Petugas Capaian Output, Petugas Weekly Report Anggota Area 5 WBK	Ruang Program
12	Deysy Marya Puansalaing, S.Pi, M.Si 19910908 202521 2 056 X	Widyaiswara Ahli Pertama PPPK	S2	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Operator SAKTI (Modul Anggaran), Operator eMonev Proyek SBSN, Tim Kepelautan Anggota Area 5 WBK	Ruang Program
13	Lucyana Ayu, S.M. 199706132025212051 IX	Penata Layanan Operasional PPPK	S1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tim Teknis Tata Kelola Kinerja Operator Kinerjaku, Operator eMonev Bappenas Anggota Area 4 WBK	Ruang Program


 Kepala Kuasa Pengguna Anggaran,
Natalia, S.ST.Pi, M.Pi
 NIP. 19801225 200502 2 001

IV. Tim Kerja Pelatihan

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Penugasan Langsung Kepala Balai	Ruangan
1	2	3	4	5	6
1	Pungky Herlambang, A.Md., S.Tr.Pi 19870225 201012 1 003 Penata Muda Tk.I, III/b	Ketua Tim Kerja Pelatihan/ Instruktur Ahli Pertama	S1	Pejabat Pembuat Komitmen Tim UPMI, Tim SPIP Tim Kepelautan PJ Area 2 WBK	Ruang Pelatihan
2	Ir. Janetie Waatung, M.Si 19660109 199103 2 002 Pembina Utama Muda, IV/c	Widyaiswara Ahli Madya	S2	Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat, PIC P2MKP/Tenaga Kerja yang Terlibat Tim UPMI	Ruang Pelatihan
3	Diane Luntungan, S.Pi 19710614 200502 2 001 Penata Tk. I, III/d	Instruktur Ahli Muda	S1	Pengelola Penyelenggaraan Diklat, Operator e-Laut Anggota Area 2 WBK	Ruang Pelatihan
4	Eunike Debora Kewas, A.Md.Kep 19801120 202521 2 017 VII	Pengelola Layanan Operasional PPPK	D3	Pengelola Penyelenggara Diklat, Tim Kepelautan Anggota Area 2 WBK Petugas Kebersihan Ruang Pelatihan dan Keuangan	Ruang Pelatihan

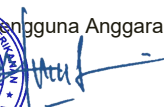
Kuasa Pengguna Anggaran,

Natalia, S.ST.Pi, M.Pi
 NIP. 19801225 200502 2 001

V. Tim Kerja Penyuluhan

No.	Nama/NIP/ Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan	Penugasan Langsung Kepala Balai	Ruangan
1	2	3	4	5	6
1	Leady J.E. Pangkola,SH, MH 19860227 200901 2 002 Pembina, IV/a	Ketua Tim Kerja Penyuluhan Analisis Metode Penyuluhan	S2	Admin Aplikasi Digiluh PJ Area 1 WBK	Ruang Tata Usaha
2	Meyki Lumintang, S.T. 19700522 200212 1 002 Penata, III/c	Analisis Metode Penyuluhan	S1	Pengadministrasi Penyuluhan PIC Prov. Sulut (107 orang) Tim WBK Area 1	Ruang Tata Usaha
3	Moch.Abdul Chalim, A.Md, S.Pi 19840229 200801 1 001 Penata, III/c	Instruktur Ahli Muda	S1	Tim Kepelautan PIC Prov. Gorontalo (70 orang) Tim WBK Area 1	Ruang Tata Usaha
4	Mashdar Awang Ismajaya Wardhana, A.Md, S.Tr. Pi 19820424 200502 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Instruktur Pelaksana Lanjutan	D4	Tim Kepelautan Operator e-Lapor, PJ Area 6 WBK PIC Prov. Sulteng (109 orang)	Ruang Tata Usaha
5	Julita Jensry Siby, S.Pi 19830722 202521 2 031 IX	Penata Layanan Operasional PPPK	S1	Operator Aplikasi Digiluh Pengadministrasi Penyuluhan Tim WBK Area 1	Ruang Tata Usaha
6	Whining Purnadwiyanti, S.Pi 19840627 201001 2 007 Pembina, IV/a	Penyuluh Perikanan Ahli Madya	S1	PIC Prov. Kaltara (46 orang)	Ruang Tata Usaha

Kuasa Pengguna Anggaran,

Netafa, S.ST.Pi, M.Pi
NIP. 19801225 200502 2 001